



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MIHARJO
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 71350

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 900.000.000

1. Tanah Seluas 250 m2 di KAB / KOTA PONTIANAK, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 241 m2/176 m2 di KAB / KOTA PONTIANAK, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 451 m2/9 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 180.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO NC1 1A3C Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOBIL, HONDA CRV HHR-V RU1 1,5SCVT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOP METIC PRESTICE Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 115.200.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 5.413.145

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.200.613.145

III. HUTANG Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)****Rp. 1.200.613.145**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.